

# 6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

## IPM dan Cita-Cita Pemerataan Pendidikan

Munadhil Abdul Muqsith

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta



[10.15408/adalah.v4i4.17490](https://doi.org/10.15408/adalah.v4i4.17490)

### Abstract:

Pendidikan merupakan salah satu variable ukuran kemajuan suatu bangsa. Kini, Pendidikan menjadi tolak ukur keadaban seorang manusia dan suatu negara. Amarty Sen pemenang nobel asal India memperkenalkan konsep ukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Konsep ini kemudian di adopsi oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sebagai tolak ukur program Human Development Index (HDI) berbagai negara. Konsep pemerataan aktif yang dikemukakan seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah membuat kebijakan ataupun mensinkronisasi kebijakan sebagai upaya mengoptimalkan salah satu kinerja pemerintah mengatasi rendahnya rata-rata pendidikan orang Indonesia yang saat ini kondisinya masih terjadi ketimpangan yang sangat jauh di antar propinsi.

**Keywords:** IPM, Pemerataan, Pendidikan

### Abstrak:

Education is one variable measure the progress of a nation. Now, education is a measure of the civility of a human being and a country. Amarty Sen, a Nobel laureate from India, introduced the concept of measuring the Human Development Index (HDI). This concept was later adopted by the United Nations (UN) as a benchmark for the Human Development Index (HDI) program of various countries. The concept of active equality that was put forward should be a consideration for the government to make policies or synchronize policies as an effort to optimize one of the government's performance in overcoming the low average education of Indonesians, which currently has a very large imbalance between provinces.

**Kata kunci:** HDI, Equity, Education

## Prolog

Pendidikan merupakan salah satu variable ukuran kemajuan suatu bangsa. Kini, Pendidikan menjadi tolak ukur keadaban seorang manusia dan suatu negara. Tahun 1990, Amarty Sen pemenang nobel asal India memperkenalkan konsep ukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Konsep ini kemudian diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sebagai tolak ukur program Human Development Index (HDI) berbagai negara. Amarty mengemukakan tiga komponen yang pencapaian IPM. *Pertama*, komponen usia harapan hidup sehat yang diukur melalui hidup sehat dan umur panjang yang diukur dengan harapan saat kelahiran.



Kedua, komponen pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa dengan bobot  $\frac{2}{3}$  dan kombinasi pendidikan dasar, menengah dan atas dengan bobot  $\frac{1}{3}$ . *Ketiga*, Standar kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari produk domestic bruto perkapita dalam paritansi daya beli.

Badan PBB Urusan Program Pembangunan (UNDP) melansir IPM Indonesia Tahun 2015 mengalami kenaikan yang positif, mengalami kemajuan sebagai negara berkembang. IPM Indonesia menempati peringkat ke 110 dari 187 negara, dengan nilai indeks 0,684. Menurut UNDP terdapat empat indikator yang digunakan untuk mengukur IPM Indonesia, yakni angka harapan hidup sebesar 68,9, harapan tahun bersekolah 13,0, rata-rata waktu sekolah yang sudah dijalani oleh orang berusia 25 tahun ke atas sebesar 7,6 dan pendapatan nasional bruto per kapita 9,788. Meski demikian, IPM Indonesia saat ini masih jauh tertinggal dari beberapa Negara ASEAN lain.

## Indeks Pembangunan Pendidikan Indonesia

Pendidikan merupakan salah satu indikator komposit capaian IPM. Berdasarkan data statistika BPS tahun 2015, Dimensi pengetahuan pada IPM terdiri dari dua Indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Kedua Indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun, sepanjang periode 2010 hingga 2015 saja, harapan lama sekolah di Indonesia telah meningkat sebesar 1,26 tahun, sementara rata-rata lama sekolah meningkat 0,38 tahun. Secara rata-rata penduduk Indonesia usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas VII (SMP kelas II). Dari data tersebut bisa kita analisa bahwa capaian target pemerintah mencanangkan kebijakan wajib belajar gratis 9 tahun masih jauh dari target yang dicanangkan.

Menurut Wasliman dalam bukunya yang berjudul Problematika Pendidikan Dasar terdapat beberapa permasalahan krusial dalam sistem pendidikan di Indonesia. *Pertama*, terkait pemerataan aksesibilitas pendidikan; *kedua*, terkait mutu pendidikan di Indonesia; *ketiga*, efisiensi pendidikan di Indonesia; *keempat*, lemahnya manajemen pengelolaan pendidikan dari lembaga atau institusi pendidikan itu sendiri. Penulis sendiri beranggapan masalah pemerataan aksesibilitas pendidikan yang merupakan masalah utama Indonesia saat ini tentu saja tanpa menegasikan ketiga permasalahan lain

## Pemerataan Pendidikan

Coleman dalam bukunya *Equality of educational opportunity* mengemukakan secara konseptual konsep pemerataan, yakni: pemerataan aktif dan pemerataan pasif. Menurutnya, pemerataan pasif lebih menekankan pada kesamaan memperoleh kesempatan untuk mendaftar di sekolah, sedangkan pemerataan aktif bermakna kesamaan dalam memberi kesempatan kepada murid-murid terdaftar agar memperoleh hasil belajar setinggi-tingginya. Dalam pemahaman seperti ini pemerataan pendidikan mempunyai makna

yang luas tidak hanya persamaan dalam memperoleh kesempatan pendidikan, tetapi juga setelah menjadi siswa harus diperlakukan sama guna memperoleh pendidikan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk dapat berwujud secara optimal (Muqsith, 2019).

Konsep pemerataan aktif yang dikemukakan Coleman seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah membuat kebijakan ataupun mensinkronisasi kebijakan sebagai upaya mengoptimalkan salah satu kinerja pemerintah mengatasi rendahnya rata-rata pendidikan orang Indonesia yang saat ini kondisinya masih terjadi ketimpangan yang sangat jauh di antar propinsi.

Berdasarkan data BPS pada tahun 2015, pencapaian pembangunan manusia di berbagai tingkat provinsi terjadi kejomplangan pada dimensi pengetahuan, harapan sekolah berkisar antara 9,95 tahun (papua) hingga 15,03 tahun (DI Yogyakarta) artinya harapan sekolah di propinsi papua rata-rata di tingkat SD kelas 4 sedangkan harapan sekolah di DI Yogyakarta rata-rata di tingkat SMP kelas III. Sedangkan, rata-rata lama sekolah berkisar antara 5,99 tahun (papua) hingga 10,70 tahun (DKI Jakarta) artinya lama sekolah kedua propinsi papua dan DKI Jakarta cukup jauh garis demarkasinya. Lama sekolah propinsi papua hanya lulus SD sedangkan propinsi DKI Jakarta sampai D1.

## **Epilog**

Berdasarkan hal di atas, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pemerataan dalam sektor pendidikan memiliki kaitan secara tidak langsung. Menurut penulis terdapat empat poin yang perlu segera dilakukan pemerintah. *Pertama*, Permasalahan Pemerataan dapat terjadi karena kurang terorganisirnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan hingga daerah terpencil sekalipun. Hal ini menyebabkan terputusnya komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Selain itu masalah peme

rataan pendidikan juga terjadi karena kurang berdayanya suatu lembaga pendidikan untuk melakukan proses pendidikan. Hal ini bisa saja terjadi jika kontrol pendidikan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah tidak menjangkau daerah-daerah terpencil. Jadi hal ini akan mengakibatkan mayoritas penduduk Indonesia yang dalam usia sekolah, tidak dapat mengenyam pelaksanaan pendidikan sebagaimana yang diharapkan.

*Kedua*, Permasalahan pemerataan pendidikan juga sangat terkait dengan disharmonisnya berbagai program kerja antar instansi pemerintah/lembaga pemerintah. Sehingga perlu segera penyelarasan program, namun harus memiliki satu rel kebijakan bersama di bawah satu komando yaitu di bawah Bappenas RI sebagai leading sektor nya.

Ketiga, Permasalahan pemerataan pendidikan ini juga terjadi karena terbatasnya sekolah dan sarana belajar di desa-desa terpencil. Perlunya membuat gerakan baru untuk mempercepat akselerasi dengan mencanangkan "Gerakan satu Desa satu sekolah."

Diharapkan kendala pemerataan akses pendidikan bisa terus berkurang, sehingga indeks rata-rata orang berusia di atas 25 tahun terus mengalami peningkatan. Akhirnya, IPM Indonesia pun bisa terus merangkak naik secara signifikan dan menjadi yang terbaik, minimal di ASEAN.

## Referensi

**Muqsith M.A.**, Muzykant V.L., Kuzmenkova K.E. (2019). Cyber protest: new media and the new social movement in Indonesia // RUDN Journal of Studies in Literature and Journalism. - 2019. - Vol. 24. - N. 4. - P. 765-775. DOI: 10.22363/2312-9220-2019-24-4-765-775

**Muqsith M.A.** (2019). The Relationship Of Political Socialization Messages Relations In Social Media Twitter With The Image Of

PKS. (Study: Political Socialization PKS Through @PKSejahtera Account). Jurnal Ilmu Komunikasi Ekspresi dan Persepsi. 2019. Vol 2 No. 1 P. 3-12. Doi: <http://dx.doi.org/10.33822/jep.v2i1.972>

**Muqsith, M.A., & Muzykant, V.** (2019). Effect of Fake News for Democracy. Jurnal Cita Hukum, 7(3), 307-318. doi:<https://doi.org/10.15408/jch.v7i3.12956>

**Muqsith M.A., Muzykant V.L.,** (2019). How New Media Becomes A Platform For Public Participation. Средства массовой коммуникации в многополярном мире: проблемы и перспективы. P. 400-404. <https://elibrary.ru/item.asp?id=42754557>

**Muqsith M.A.,** (2018). The Use Of Hashtag In The Political Campaign. Средства массовой коммуникации в многополярном мире: проблемы и перспективы. P (352-354). <https://elibrary.ru/item.asp?id=36910734>

**Muqsith M.A.,** (2019). Legislatif Kuat, Demokrasi Stabil?. 'ADALAH : BULETIN HUKUM & KEADILAN. P. 13-20. [10.15408/adalah.v4i1.15265](https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15265)

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

**Penasehat:** Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Tim Redaktur:** Indra Rahmatullah, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar, Fathuddin, Nurrohimyunus. **Penyunting:** Latipah Nasution, Siti Nurhalimah, Siti Romlah. **Setting & Layout:** Imas Novita Juaningsih.